

# 2022

**KAJIAN RASIONALISASI TARGET INDIKATOR  
KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH 2021-2026 KABUPATEN  
PESISIR SELATAN**



Disusun Oleh :  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Berkerjasama Dengan:  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**



# **KAJIAN RASIONALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH TAHUN 2021-2026**

## **TIM PENYUSUN:**

HADI SUSILO, S.STP, M.Si  
Drs. ADRI, M.Si  
AHMAD HIDAYAT, S.STP, M.Sc  
RUDI ANWAR, ST  
MARDONI, SE, M.Si  
BENNY ROKMANSYAH. A, S.Pt  
DONNY TAYES, SKM, M.Si  
DEDI JUNAEDI, SAP  
RIFTOMI, ST  
FEBRIADI, SS  
HARRISON TAR, S.Pi, M.Si  
ABDUL HAMID, SP  
WERY ESRA VELNI, SE, Ak  
ANDI ASMARA, S.T  
NOFENDRI, S.Si, M.Si, M.I.L  
FERA EZA SAFITRI, S.E, M.Si  
SOVIA DEWI, S.E, M.Si  
LUCYA LIDYA SARI, S.P  
SURYATMONO, S.Si  
DEASY ITRAVIA, SE  
YULITA BUSRALI, SE.,MM  
HANIFAH ASZA, S.P.W.K

## **TIM ASISTENSI:**

Prof. Dr. Ir. MELINDA NOER, M.Sc  
YUERLITA, S.Si., M.Si., Ph. D



**KABUPATEN PESISIR SELATAN  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt, atas berkat rahmat dan karunia Nya dokumen Kajian Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten pesisir selatan dapat diselesaikan. Kajian ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan (capaian) implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar untuk rasionalisasi penetapan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahap IV yang akan berakhir dalam 3 tahun yang akan datang. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan tahap IV berakhir bersamaan dengan berakhirnya implementasi Pelaksanaan RPJPD 2005 - 2025.

Dengan selesainya dokumen kajian rasionalisasi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pembangunan tahunan untuk periode 2023-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

diharapkan akan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan tahap berikutnya bagi pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun rencana pembangunan daerah tahun yang akan datang. Saran dan kritik membangun demi kesempurnaan hasil kajian dan melengkapi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD kedepan sangatlah diharapkan.

Kepada Tenaga Ahli dari Universitas Andalas ibu Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc. dan ibu Yuerlita, S.Si., M.Si., Ph. D diucapkan terimakasih atas bantuan dan fasilitasnya dalam diskusi selama penyusunan dokumen evaluasi ini. Semoga dokumen ini bermanfaat dalam merencanakan kemajuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di masa datang.

Painan, 12 Desember 2022

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan  
Kepala,



**HADI SUSILO, S.STP., M.Si**  
Nip. 19770522 199703 1 001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Luaran.....	4
1.5. Manfaat.....	4
II. KERANGKA INDIKATOR KINERJA .....	5
III. METODA.....	8
3.1. Pendekatan.....	8
3.2. Tahapan.....	9
3.3. Lingkup Kegiatan.....	9
IV. HASIL REVIEW.....	11
4.1. Hasil Review Dokumen RPJMD 2021-2026 .....	11
4.2. Review Indikator Kinerja Utama .....	15
4.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah - RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan .....	20
4.4. Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021-2026 .	61
V. PENUTUP.....	68
LAMPIRAN .....	70

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Hasil Review Dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan...	11
2. Hasil review penggunaan indikator kinerja utama dan indikator kinerja OPD terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan .	16
3. Analisis IKU Daerah .....	20
4. Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review .....	26
5. Analisis Inikator Kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) .....	38
6. Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review sebagai Indikator Kinerja OPD.....	47
7. Rasionalisasi Target kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review .....	61

**DAFTAR GAMBAR****Gambar****Halaman**

1. Hirarki Indikator Kinerja Pembangunan.....	7
2. Hubungan logis yang dibangun dalam Cascading Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026.....	15

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan lebih baik secara terarah dan terencana secara konseptual dengan memperhatikan lingkungan dan kondisi daerah dimana rencana pembangunan akan diimplementasi. Rencana pembangunan dibuat dalam bentuk dokumen agar dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana pembangunan (organisasi pelaksana daerah) dan mengukur rencana dengan realisasi sesuai standard dan indikator yang ditetapkan. Wujud dokumen rencana sesuai dengan periode perencanaan pembangunan yaitu, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD). Tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah terwujudnya pembangunan manusia melalui pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dengan indikator yang jelas dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 telah menyusun RPJMD 2021-2026 dan menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar hukum. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka Visi dan Misi dari kepala daerah terpilih perlu dituangkan ke dalam dokumen RPJMD berupa program dan kegiatan dengan strategi dan kebijakan yang jelas untuk mendukung program dan kegiatan agar terlaksana dengan baik sesuai tujuan pembangunan jangka menengah yang ditetapkan. RPJMD kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah RPJMD terakhir dalam periode RPJPD 2005-2025, sehingga RPJMD ini menentukan keberhasilan tujuan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan 20 tahun yang lalu.

Keberhasilan capaian pembangunan daerah yang direncanakan dan dituangkan sebagai sebuah ketetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah memerlukan indikator kinerja untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Indikator kinerja daerah tersebut adalah Indikator

Kinerja Utama (IKU). Selain IKU, ada indikator lain sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), yakni indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pemerintah pelaksana pada akhir periode masa jabatan kepala daerah.

Selain itu, penyusunan dan implementasi RPJMD 2021-2026 berada dalam periode pengendalian bencana virus yang tiba-tiba mengancam kesehatan manusia yakni pandemi virus covid-19. Akibatnya, perencanaan pembangunan disusun dalam kondisi yang tidak stabil dan penggunaan sumberdaya pembangunan lebih banyak digunakan untuk program dan kegiatan penanggulangan korban, mengantisipasi gejala serangan, dan meminimalisir penyebaran virus covid19. Secara nasional, setiap daerah diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran (*refocussing*) pembiayaan pembangunan untuk segera menyelesaikan masalah akibat pandemic virus covid19. Masalah yang diakibatkannya bukan hanya mengganggu kesehatan manusia saja, tetapi juga berdampak kepada aktivitas usaha ekonomi masyarakat, ekonomi pembangunan daerah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan, karena masyarakat tidak lagi boleh berkumpul dan membuat keramaian dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Diberlakukan aturan Pembatasan Sementara Pergerakan Bersama (PSPB) secara nasional di setiap daerah, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan dengan itu, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditinjau ulang melalui kegiatan review RPJMD ini. Sebagai RPJMD tahap akhir dari RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan, maka RPJMD 2021-2026 tentu sangat menentukan terwujudnya rencana jangka panjang dan menjadi dasar untuk penyusunan tahapan jangka panjang pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

## 1.2. Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk melakukan asesmen terhadap dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan rasionalisasi standar dan target IKU pembangunan daerah supaya waktu



yang tersisa (tahun 2023-2026) untuk pencapaian target akhir RPJMD 2021-2026 dapat terwujud. Rincian tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Melakukan asesmen umum terhadap dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan secara materi Bab per Bab
- b. Mengukur dan menganalisis capaian (keberhasilan) kebijakan/program/kegiatan berupa lima puluh dua IKU RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan,
- c. Menilai relevansi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator pembangunan daerah dan kinerja pemerintahan daerah kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Melakukan penyesuaian target IKU tahun 2023-2026 untuk terwujudnya capaian target RPJMD sesuai target RPJPD 2005-2026.

### **1.3. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026

#### **1.4. Luaran**

Hasil kegiatan ini adalah dokumen berupa hasil review dan rekomendasi berupa rasionalisasi standar dan target Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2022 sesuai capaian yang telah terlaksana tahun 2021 dan 2022.

#### **1.5. Manfaat**

Sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2030 Kabupaten Pesisir Selatan.

## II. KERANGKA INDIKATOR KINERJA

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah adalah kinerja instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Permenpan RI, 2007). Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai secara rasional (*Achievable*), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (*Relevant*), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (*Time bound*), yang disingkat dengan dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

- a. *Specific*/Spesifik (*S*); indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir)
- b. *Measurable*/Terukur (*M*); dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas)
- c. *Achievable* (*A*); dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada di dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- d. *Result-Oriented/Relevant* (*R*); terkait secara logis dengan kebijakan/ program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- e. *Time-Bound* (*T*); memperhitungkan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menilai capaian indikator, dilakukan evaluasi yang fokus utamanya adalah perencanaan yang transparan dan akuntabel, disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana sekurang-kurangnya meliputi;

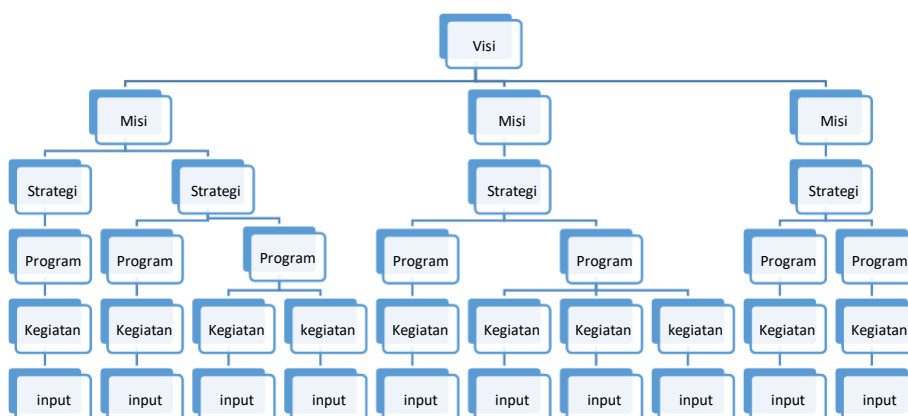
- indikator masukan,
- indikator keluaran, dan

- indikator hasil/manfaat.

Secara hierarkis, jenis indikator terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

- **Indikator *Impact*:** Menunjukkan pengaruh/perubahan, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah digunakan;
- **Indikator *Outcomes*:** Mengukur capaian dari pelaksanaan program melalui berbagai kegiatan. Mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah;
- **Indikator *Output*:** Mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan; dan
- **Indikator *Input*:** Mengukur jumlah dan kualitas sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Hirarki kinerja juga menunjukkan posisi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja pemerintah daerah yang akan membuktikan tercapainya Visi. Visi dicapai apabila terlaksana dan tercapainya tujuan semua Misi. Misi kemudian diturunkan kepada strategi, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas / institusi terkait. Semua itu didukung dengan kebijakan yang jelas yang mendukung strategi agar semua Misi tercapai sesuai tujuannya. Oleh karena itu hirarki Indikator juga dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Hirarki Indikator Kinerja Pembangunan**

### III. METODA

Peninjauan kembali sebuah rencana merupakan kegiatan monitoring dan mengevaluasi yang dilakukan terhadap dokumen rencana dan hasil implementasi rencana. Evaluasi adalah proses “penilaian” yang sistematis dan objektif terhadap sesuatu dengan mengkaji dan membuat keputusan secara hati-hati berdasarkan berbagai faktor tertentu. Review dilakukan terhadap semua Bab dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan, namun lebih difokuskan kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target – targetnya.

#### 3.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan review RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- Pendekatan objektif:  
Review IKU dilakukan secara objektif menggunakan standar dan aturan yang berlaku, serta perbandingan dengan aturan yang ada. Pohon kinerja, indikator dan target IKU yang dibuat sebagai kerangka berpikir penetapan IKU RPJMD 2021-2026 dievaluasi dan didiskusikan bersama stakeholders, khususnya OPD terkait. IKU yang jumlahnya 52 (limapuluh dua) dengan target – target objektifnya dianalisis dan dirasionalisasi.
- Pendekatan subjektif:  
Review IKU juga dilakukan dengan pendekatan subjektif, yakni memperhatikan sistem nilai, capaian serta kualitas hasil kinerja tahun 2021-2022 yang dipengaruhi kualitas sumberdaya yang tersedia. Target yang tidak tercapai maupun capaian yang melewati target pada tahun 2021-2022 diidentifikasi dan dianalisis untuk dilakukan pula rasionalisasi. Tujuannya agar target2 yang masih tersisa untuk tahun 2023-2026 dapat dicapai dengan kondisi yang lebih baik.
- Asumsi-asumsi tertentu.

Penilaian terhadap RPJMD 2021-2026 ini selain menggunakan pendekatan objektif dan subjektif di atas, juga memperhatikan kondisi keuangan daerah, implementasi dan hasil intervensi program yang sedang berlangsung atau yang telah selesai sesuai peraturan perundangan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penertiban Aparatur Negara yang berlaku. IKU dinilai berdasarkan cakupan kinerja daerah sesuai Visi dan Misi yang ditetapkan.

### **3.2. Tahapan**

Pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis kebijakan/program/kegiatan. Selanjutnya evaluasi dilakukan terhadap semua IKU dan target2nya. Tahapan kerja evaluasi RPJMD 2021-2026 Kabupaten pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- Review umum dan materi Bab per Bab
- Review 52 (limapuluh dua) indikator yang ditetapkan sebagai IKU
- Evaluasi realisasi capaian IKU tahun 2021 dan 2022 (apabila ada data)
- Rekomendasi Rasionalisasi target IKU tahun 2023-2026
- Penutup

### **3.3. Lingkup Kegiatan**

- a. Mereview dokumen RPJMD bab per bab dan menyandingkan muatannya dengan peraturan perundangan berlaku, yakni Kemendagri No.86 tahun 2017, Kemendagri Nomor 9 tahun 2019, Kemendagri Nomor 50 tahun 2021.
- b. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan stakeholders (OPD Terkait) difasilitasi Tim Pelaksana Kerja Review RPJMD, Bidang Penelitian Bapelitangda Kabupaten Pesisir Selatan;

c. Menyusun rekomendasi terhadap rasionalisasi standar dan target IKU RPJMD 2021-2026 berdasarkan hasil FGD.

Evaluasi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan ini juga memperhatikan:

1. Kaidah kerangka logis (*logical framework*) menggunakan *cascade* IKU yang disusun untuk RPJMD 2021-2026
2. Perkembangan kondisi sosial ekonomi daerah kabupaten Pesisir Selatan terutama akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa target indikator kinerja perlu penyesuaian
3. Realisasi capaian indikator pembangunan, yakni realisasi IKU tahun 2021 dan 2022
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur; dan
9. Memperhatikan program prioritas yang fokus pada pencapaian sasaran strategis RPJMD.



## IV. HASIL REVIEW

### 4.1. Hasil Review Dokumen RPJMD 2021-2026

Secara umum penyajian dokumen RPJMD 2021-2026 Kab Pesisir Selatan sudah memenuhi sistematika sebagaimana diatur Kemendagri No. 86 tahun 2007, yakni terdiri dari:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
- d. Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah;
- e. Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
- f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. Bab IX Penutup.

Tabel 1 menyajikan hasil review terhadap muatan materi Bab per Bab RPJMD 2021-2026 Kabupaten pesisir Selatan.

**Tabel 1. Hasil Review Dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan**

Materi Dokumen RPJMD 2021-2026		Hasil Review Materi
Bab	Judul bab	
I	Pendahuluan	Latar belakang di dalam bab pendahuluan terdiri dari pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Namun, dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan belum menyajikan secara eksplisit bentuk keterkaitan substansi perencanaan dimaksud.

Materi Dokumen RPJMD 2021-2026		Hasil Review Materi
		Tujuan penyusunan perencanaan baru sebatas tujuan penyusunan dokumen, dan belum ada tujuan penyusunan perencanaan sebagai pedoman monitoring dan evaluasi dan dasar pengawasan.
II	Gambaran Umum Kondisi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu efisiensi dalam penyajian (contoh: Tabel dan Gambar menjelaskan tentang data yang sama, 2 tabel dapat disatukan)</li> <li>• Antar gambar atau tabel perlu pengantar</li> <li>• Ada data yang kurang diberi makna (misal daya tarik wisata)</li> <li>• Data yang digunakan masih ada yang tahun 2017 (daya dukung daya tampung LH)</li> <li>• Secara umum Bab II seharusnya banyak dikaitkan dengan Isu Strategis (Bab IV) dan Visi Misi (Bab V)</li> <li>• Perlu analisis dan penjelasan data-data yang disajikan, misalnya pada Tabel 2.12 indeks jasa ekosistem bayang dan bayang utara sangat berbeda (masing-masing mempunyai indeks jasa ekosistem terendah dan tertinggi)</li> <li>• Penyajian data yang sama dalam bentuk tabel dan grafik tidak diperlukan. Misalnya informasi grafik 2.11 sudah disajikan pada tabel 2.12. Sebaiknya ditambahkan pembahasan atau penjelasan dari indeks yang diperoleh.</li> <li>• Perlu dijelaskan kalau daya dukung pangan yang dimaksud adalah memang produksi padi saja</li> <li>• Pada tabel 2.16 tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud kebutuhan air orang yang tinggal di kawasan perkebunan, lahan pertanian basah, dan kering? atau kebutuhan air untuk kebutuhan perkebunan, pertanian, dst. narasi yang dijelaskan sebelum tabel ini berbeda dengan isi tabel 2.16</li> <li>• Beberapa pernyataan perlu penjelasan lebih lanjut, misalnya Kebutuhan air kawasan</li> </ul>

Materi Dokumen RPJMD 2021-2026		Hasil Review Materi
		pertanian lahan basah lebih besar dari kawasan pertanian lahan kering
III	Gambaran Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ditambah penjelasan mengapa kondisi keuangan demikian terjadi</li> <li>• Perlu ditambahkan analisis kinerja keuangan masa lalu seperti perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambar realisasi belanja daerah</li> <li>• Sebaiknya dana diluar APBD dan APBN juga diperhitungkan sebagai kemampuan keuangan daerah</li> <li>• Perlu didukung dengan neraca daerah seperti analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan aktifitas</li> <li>• Perlu ditambahkan analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu</li> </ul>
IV	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ada keterkaitan yang lebih kuat masalah dengan Isu strategis</li> <li>• Telaah isu strategis berdasarkan RPJMD Provnsi Sumatera Barat belum dipaparkan dengan baik</li> <li>• Pada bagian telaah isu strategis berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) seharusnya dapat dipetakan isu strategis di kabupaten Pesisir Selatan ke tujuh belas TPB</li> <li>• Telaah isu strategis berdasarkan RTRW seharusnya dapat menganalisis keintegrasian atau kesesuaian dengan RTRW</li> <li>• Isu strategis tidak berdasarkan gambaran kondisi saat ini, serta tidak semua isu strategis masuk dalam program.</li> <li>• Pada bagian akhir sub bab permasalahan dan isu strategis disimpulkan delapan isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten Pesisir Selatan, namun kedelapan poin tersebut lebih mengarah pada strategi</li> </ul>
V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi dan misi hendaknya dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran sehingga dapat dioperasionalisasikan dengan baik melalui</li> </ul>

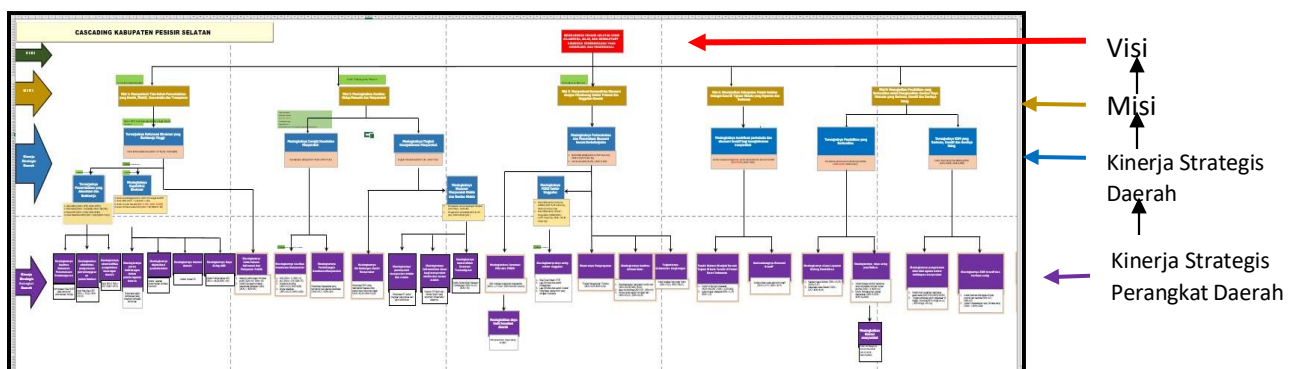
Materi Dokumen RPJMD 2021-2026		Hasil Review Materi
		<p>program-program pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah disajikan tabel proyeksi target - target indikator makro tahun 2026, namun belum didukung dengan hasil analisis dan data sebelumnya sebagai premis perencanaan</li> </ul>
VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan strategi dan arah kebijakan saling tertukar / saling menggantikan</li> <li>• Pemaparan program pembangunan daerah hendaknya dilengkapi dengan OPD penanggungjawab sehingga menunjukkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam pencapaian sebuah program</li> </ul>
VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ditambahkan kerangka pendanaan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah.</li> <li>• Analisis dan diskusi dapat dilakukan berdasarkan realisasi tahun 2021 dan basis tahun 2020</li> </ul>
VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan target setiap indikator kinerja perlu didukung dengan analisis kondisi RPJMD periode sebelumnya dan menggunakan data realisasi terbaru</li> <li>• Pengumpulan data dan informasi perlu didukung dengan metoda yang jelas dan dipahami semua stakeholders</li> <li>• OPD seharusnya dapat mengukur kinerjanya sejak awal supaya tidak terjadi penurunan dalam realisasi</li> <li>• Perubahan aplikasi seharusnya tidak membuat kinerja turun apabila butir - butir penilaian selalu dipantau, tercatat dan tersimpan dengan baik</li> <li>• Walaupun kinerja tidak diukur oleh kabupaten, butir - butir penilaian sebaiknya diidentifikasi dan dipantau sejak awal untuk dapat membuat proyeksi bayangan sebelum kinerja dinilai</li> </ul>
IX	Bab IX Penutup	Perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan,

Materi Dokumen RPJMD 2021-2026	Hasil Review Materi
	misalnya bentuk pendekatan teknokratik/partisipatif yang telah dilaksanakan

## 4.2. Review Indikator Kinerja Utama

RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 52 (limapuluh dua) IKU yang berasal dari kerangka pohon kinerja sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Gambar tersebut berjudul Cascading Kabupaten Pesisir Selatan. Hubungan yang terlihat adalah hubungan kerangka logis untuk menunjukkan kerangka pikir dan tahapan pemerintah untuk mencapai Visi, melalui indikator - indikator kinerja yang disusun berhirarki (bertingkat).

Visi diukur dengan menggunakan sebuah indikator kinerja yang paling tinggi (hirarki pertama) yang akan dicapai melalui indikator-indikator kinerja yang mewakili lima Misi (hirarki kedua). Kelima Misi akan dapat diwujudkan apabila tercapai indikator - indikator Kinerja Strategis Daerah (hirarki ketiga). Selanjutnya indikator kinerja strategis daerah akan terwujud apabila indikator-indikator kinerja strategis perangkat daerah (hirarki keempat) terwujud.



**Gambar 2. Hubungan logis yang dibangun dalam Cascading Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026**

Jumlah IKU sebanyak 52 (limapuluh dua) di dalam dokumen RPJMD 2021-2026 adalah jumlah semua indikator yang ditetapkan untuk semua tingkat kinerja untuk mencapai visi. Namun sesungguhnya, tidak semua indikator tersebut harus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), karena ada indikator yang sangat bersifat teknis dan merupakan kinerja yang harus diwujudkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai indikator kinerja perangkat daerah. Tabel 2 menyajikan hasil review terhadap IKU RPJMD 2021-2026 Kabupaten pesisir Selatan.

**Tabel 2. Hasil review penggunaan indikator kinerja utama dan indikator kinerja OPD terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penyesuaian	
			Kinerja Utama Daerah	Kinerja OPD
1.	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	V	
2.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	V	
3.	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	V	
4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	V	
5.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	V	
6.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	V	
7.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	V	
8.	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	V	
9.	Indeks SPBE	tanpa satuan	V	
10.	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	V	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penyesuaian	
			Kinerja Utama Daerah	Kinerja OPD
11.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	V	
12.	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	V	
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	V	
14.	Usia Harapan Hidup	tahun	V	
15.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup		V
16.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup		V
17.	Prevalensi stunting	persen		V
18.	Angka Kesakitan	persen		V
19.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen		V
20.	Tingkat Kemiskinan	persen	V	
21.	Indeks Gini	tanpa satuan	V	
22.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen		V
23.	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen		V
24.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	V	
25.	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	V	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penyesuaian	
			Kinerja Utama Daerah	Kinerja OPD
26.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rupiah		V
27.	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Triliun Rupiah		V
28.	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rupiah		V
29.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	V	
30.	Rasio Konektivitas	persen		V
31.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen		V
32.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen		V
33.	Indek kualitas lingkungan hidup	Tanpa satuan	V	
34.	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang		V
35.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang		V
36.	Lama tinggal wisatawan	hari		V
37.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rupiah		V
38.	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen		V
39.	Harapan Lama Sekolah	tahun		V
40.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun		V
41.	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang		V



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penyesuaian	
			Kinerja Utama Daerah	Kinerja OPD
42.	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	tanpa satuan	V	
43.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan		V
44.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen		V
45.	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan		V
46.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang		V
47.	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	orang		V
48.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	V	
49.	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen		V
50.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen		V
51.	Jumlah nagari Tangguh bencana	nagari	V	
52.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan		V

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 2 di atas, ada 29 (dua puluh sembilan) indikator yang diidentifikasi berada pada level indikator kinerja OPD. Artinya hanya 23 (dua puluh tiga) indikator yang merupakan indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (IKU).

#### 4.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah - RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya hasil review di atas digunakan untuk menganalisis IKU berdasarkan target dan capaian tahun 2021. Data capaian tahun berjalan (tahun 2022) belum diperoleh untuk digunakan dalam analisis. Beberapa catatan terhadap evaluasi IKU adalah seperti Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Analisis IKU Daerah**

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
1.	Pertumbuhan Ekonomi	IKU ini bernilai kinerja rendah karena tahun 2021 pemerintah daerah masih mengalami dampak pandemic yang berdampak pada menurunnya produktivitas daerah. Namun demikian, walaupun target th 2022 lebih rendah dibanding realisasinya, namun target 2023-2026 sudah rasional.	Target tetap
2.	a. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Skor Nilai LPP	IKU daerah penting mendapat perhatian pemerintah secara komprehensif karena kinerjanya sangat ditentukan oleh komitmen OPD terkait.	Komponen penilaian IKU terintegrasi perlu didukung setiap OPD secara efektif
3.	a. Level maturitas SPIP Pemda b. Indeks Kelembagaan c. Indeks Kebahagiaan	IKU yang selama ini dinilai oleh Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat atau pemerintah provinsi) menjadikan pemerintah daerah Kabupaten sulit menjamin baiknya kinerja, karena capaiannya diukur dengan instrumen pengukuran indikator yang tidak disiapkan pemda kabupaten. Sementara,	Pemerintah Daerah perlu memahami dan mempelajari instrument yang dipakai, sehingga menyiapkannya sejak awal tahun pembangunan dilaksanakan

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
4.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terdapat kesalahan penulisan pada target atau realisasi 2021, setelah diklarifikasi perlu direvisi. Tertulis capaian tahun 2021 sebesar 66.88, seharusnya 68.72	Perlu cek dan ricek oleh setiap OPD untuk setiap penetapan data kuantitatif pada kondisi awal dan target yang akan ditetapkan, berdasarkan analisis yang matang dan data yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan
5.	Indeks SPBE	Tertulis target tahun 2021 sebesar 3,2 seharusnya 3.12. Skala penilaian Indeks SPBE berkisar dari 2,6-3,5 tergolong kategori Baik. Nilai maksimal adalah 5. Dengan demikian Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan berada dalam kategori baik dan tahun 2021 menjadi yang terbaik di Prov. Sumbar dan peringkat 6 tingkat nasional. Dinas KOMINFO optimis menaikkan nilai target Indeks SPBE pada tahun 2022 menjadi 3.40, tahun 2023 menjadi 3.55, tahun 2024 menjadi 3.75, tahun 2025 menjadi 3.95 dan pada tahun 2026 menjadi 4.00. Hal tersebut didasarkan kepada telah tersedianya arsitektur SPBE pada tahun 2023. Sebab tersedianya arsitektur SPBE memberikan kontribusi yang besar, terhadap peningkatan nilai secara keseluruhan	Perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2023-2026 karena sesuai dengan optimisme dan kemampuan OPD terkait

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
6.	Indeks profesionalitas ASN	<p>IKU tidak mencapai kinerja yang memuaskan hanya karena tidak mampu melengkapi persyaratan adminstrasi sebagai bukti kinerja, sehingga kinerja tergolong sangat rendah (&lt;50%). Bukti administratif tersebut antara lain berupa sertifikat pelatihan atau kegiatan kompetensi dan profesional yang diikuti. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya (Peraturan BKN Nomor 8/ 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara). Rincian butir indikator penilaian adalah: (1.) Disiplin (5%); (2.) Kualifikasi pendidikan (25%); (3.) Kompetensi (40%); (4.) Kinerja(30%).</p> <p>Range penilaian: sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (dibawah 60). Berdasarkan hal-hal diatas maka BKPSDM melakukan penurunan target capaian untuk tahun 2023 menjadi 58, tahun 2024 menjadi 59, tahun 2025 menjadi 60 dan pada tahun 2026 menjadi 62.</p>	Target tidak perlu diturunkan karena hanya memerlukan kelengkapan pembuktian kinerja secara adminsitratif untuk meningkatkannya.

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
7.	IKU keterbukaan informasi publik	IKU ini tidak mencapai kinerja yang memuaskan karena perubahan aplikasi, sehingga perlu penyesuaian data yang dibutuhkan. Range penilaian untuk kategori keterbukaan informasi publik senilai 91-100 berada dikategori informatif. Pada tahun 2021 nilai kategori keterbukaan informasi publik Pesisir Selatan berada di angka 97. Untuk merasionalisasikan target IKU RPJMD pada tahun 2023 kominfo menurunkan target menjadi 94, tahun 2024 menjadi 95, tahun 2025 menjadi 96, dan pada tahun 2026 menjadi 97. Penurunan target ini didasarkan oleh terjadinya perubahan aplikasi yang digunakan. Sampai dengan tahun 2021, Pesisir Selatan menggunakan aplikasi Satu Data Pesisir Selatan (Sinar Pessel) yang merupakan aplikasi hasil pengembangan sendiri. Pada 2022 kabupaten/kota diharuskan menggunakan aplikasi satu data dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya dikhawatirkan terjadi penurunan nilai capaian secara keseluruhan	Target tidak perlu diturunkan karena perubahan aplikasi tidak merubah secara signifikan komponen / unsur yang dinilai
8.	IKU indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Target IKU ini terlalu rendah dari kemampuan capaian. Namun FGD mengungkap kekhawatiran OPD meningkatkan target karena capaian indeks tersebut hanya diukur pada 3 sampel OPD yang melakukan pelayanan publik saja	Perlu kerjasama antar OPD untuk penyediaan data yang akurat, dipercaya dan dilakukan secara kontiniu supaya

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
		(Rumah Sakit M. Zein, BKPSDM, dan Dinas DUKCAPIL). Apabila diukur kinerja untuk semua OPD yang melakukan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan, diperkirakan belum akan mencapai nilai kinerja yang baik.	data selalu update. Selain itu juga perlu peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis OPD dalam penggunaan metoda pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
9.	IKU indeks lingkungan hidup	IKU ini mengalami perubahan formulasi untuk skor penilaian. Perubahan formulasi ini menyebabkan angka Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2021 menurun. Untuk target ditahun 2023 hingga tahun 2026, dinas Perkimtan LH melakukan penyesuaian target yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Berdasarkan surat edaran ini maka target dinas perkimtan LH menjadi sebagai berikut; tahun 2022 menjadi 72.45, tahun 2023 menjadi 72.76, tahun 2024 menjadi 73.07, tahun 2025 menjadi 73.38 dan pada tahun 2026 menjadi 73.69.	Target disesuaikan dengan formula yang baru.
10	IKU nagari tangguh bencana	IKU ini ternyata hanya diukur dengan terbentuknya KSB (Kelompok Siaga Bencana) di	Kriteria Nagari pratama perlu dikaji juga dari

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
		Nagari pada tahun 2016-2017, pada 182 nagari sebagai nagari Pratama. Namun sampai dengan tahun 2021, KSB tersebut sudah tidak aktif. Tahun 2022, tinggal 45 nagari yang berstatus Pratama. Oleh sebab itu BPBD melakukan rasionalisasi jumlah nagari tangguh bencana sbb: tahun 2023: 67 nagari pratama, tahun 2024: 87 nagari pratama, tahun 2025: 107 nagari pratama, tahun 2026: 127 nagari pratama.	ketangguhan secara ekonomi dan sosial dalam mengatasi kebencanaan. Terbentuknya KSB perlu dilengkapi dengan kemampuan KSB untuk mengelola dirinya sendiri dalam menghadapi kebencanaan.

Hasil analisis dan rasionalisasi terhadap Target tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
1.	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,06	70,03	99,96	masih relevan	-	Target tahun 2023-2026 tetap
2.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,55	3,37	132,16	Walaupun target th 2022 lebih rendah dibanding realisasinya, namun target 2023-2026 sudah rasional	-	Target tahun 2023-2026 tetap
3.	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	56 (CC)	56 (CC)	100,00	masih relevan	-	Target tahun 2023-2026 tetap
4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	100,00	masih relevan	-	Target tahun 2023-2026 tetap
5.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	68 (B)	66,88 seharusnya 66,67 (B)	98,12	Justifikasi peningkatan target akuntabilitas kinerja instansi yang cukup tinggi	Penetapan target baru dalam rangka rasionalisasi, perlu peran serta lintas instansi, sebab penilaian	Target tahun 2023-2026 tetap



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
						mengingat capaian 2021 dibawah target	AKIB merupakan akumulasi dari 5 komponen penilaian yakni; a. Perencanaan kinerja: Bapedalitbang b. Pengukuran Kinerja: Bapedalitbang c. Pelaporan Kinerja: Bagian Organisasi d. Evaluasi Kinerja: Inspektorat e. Capaian Kinerja: Tim + OPD	
6.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3209	100	Perlu justifikasi peningkatan target LPPD berdasarka	Skor Nilai LPPD terakhir dinilai pada tahun 2019. Setelah tahun 2019,	Target 2023-2026 tetap

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
						n capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk capaian kinerja makro, penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	penilaian tidak lagi dilakukan oleh instansi dari Pusat. Penetapan target dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan indikator kinerja yang ditetapkan pada Permenpan & RB. Indeks dihitung misalnya berdasarkan rata-rata hasil survei misalnya pada dua tingkatan organisasi tertinggi, dst	
7.	Level Maturitas SPIP Pemd	tanpa satuan	3	3	100	Masih relevan	Penilaian bukan oleh pmda kabupaten	Target 2023-2026 tetap
8.	Indeks	tanpa	P-3	P-3	100	Masih	Data indeks	Target 2023-

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
	Kelembagaan	satuan	(Cukup efektif)	(Cukup efektif)		relevan	kelembagaan belum tersedia disebabkan belum adanya formula penilaian dari provinsi. Sampai saat ini provinsi belum melakukan penilaian untuk Indeks Kelembagaan.	2026 tetap
9.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,2 seharusnya 3,12	3,34	107,05	masih relevan	Cakupan layanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan telah terselenggaranya aplikasi SIPD, E-SAKIP, dan telah terinteroperabilitasnya	Target 2023-2026 tetap

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							aplikasi SINAR PESEL dengan aplikasi SIMDUK Dinas DUKCAPIL. Aplikasi SINAR dan PPID milik Pesisir Selatan saat ini juga telah direplikasi oleh beberapa kabupaten di Sumatera Barat.	
10.	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	57	48,78	85,58	Penetapan target jauh diatas capaian dan terus meningkat sangat tinggi terutama tahun 2023-2026	Capaian tahun 2021 menjadi rendah karena BKPSDM tidak mampu membuktikan kinerja secara administratif, a.l. sertifikat pelatihan. Target	Sebaiknya target 2023-2026 tetap, dengan memenuhi kelengkapan berkas administratif sebagai bukti kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							diminta untuk diturunkan: tahun 2023 menjadi 58, tahun 2024 menjadi 59, tahun 2025 menjadi 60 dan pada tahun 2026 menjadi 62.	
11.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93 informatif	97 informatif	104,30 informatif	Target terlalu rendah, sementara capaian sudah sangat baik. Seharusnya target tidak diturunkan.	Penurunan target ini didasarkan pada perubahan aplikasi yang digunakan. Sampai dengan tahun 2021, Pesisir Selatan menggunakan aplikasi Satu Data Pesisir Selatan (Sinar Pessel) yang merupakan aplikasi	Sebaiknya target 2023-2026 tetap dengan memenuhi kriteria penilaian yang selama ini sudah menunjukkan kinerja baik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							hasil pengembangan sendiri. Pada 2022 kabupaten/kota diharuskan menggunakan aplikasi satu data dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya dikhawatirkan terjadi penurunan nilai capaian secara keseluruhan.	
12.	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	5,150	49,34	Telah mencapai Inovativ	Skor penilaian berubah	Karena diberlakukan penyesuaian skor target dengan indikator Juknis yang baru, terjadi perubahan skor range	Target disesuaikan dengan sistem penilaian skor baru: tahun 2022: 60.02, tahun 2023: 62.32, tahun 2024: 62.52, tahun 2025: 62.72

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							nilai IID menjadi 0 s.d 100. Kategori Tidak inovatif 0, kurang inovatif 0,01-34,99, Inovatif 35,00 - 60,00, Sangat Inovatif 60,01-100.	dan tahun 2026: 62.82.
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	80,00	83,65	104,56	Target terlalu rendah	Sampel mengukur pelayanan publik hanya pada 3 OPD (Rumah Sakit M. Zein, BKPSDM, dan Dinas DUKCAPIL) saja, belum semua OPD yang melakukan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.	Target 2023-2026 tetap, dengan catatan: metoda pengukuran kinerja perlu ditingkatkan dengan sumber data semua OPD pelayanan publik.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
14.	Usia Harapan Hidup	tahun	71,04	70,96	99,89	Kinerja perlu ditingkatkan	Perlu kerjasama yang lebih baik antar OPD untuk kinerja peningkatan AHH dengan akurasi data yang lebih tinggi	Target 2023-2026 tetap
15.	Tingkat Kemiskinan	persen	7,55	7,92	95,33	Kinerja perlu ditingkatkan	Perlu kerjasama yang lebih baik antar OPD untuk kinerja penurunan tingkat kemiskinan dengan akurasi data yang lebih tinggi	Target 2023-2026 tetap
16.	Indeks Gini	tanpa satuan	0,25	0,253	98,81	Kinerja perlu ditingkatkan	Tujuan misi ke-3: Semakin menurunnya tingkat ketimpangan dengan mempertahankan Indeks Gini di	Target 2023-2026 tetap



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							0,233 pada tahun 2026. Perlu peningkatan kinerja	
17.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/ thn	9.212.000	9.270.000	100,63	masih relevan		Target 2023-2026 tetap
18.	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	9,711	9,79	100,81	masih relevan	gunakan nilai PDRB (ADHK) saja, sehingga sektor pertanian dan industri tdk perlu dimasukan	Target 2023-2026 tetap
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,93	5,97	116,08	masih relevan		Target 2023 - 2026 tetap
20.	Indek kualitas lingkungan hidup	Tanpa satuan	86,74	75,8	87,39	Capaian jauh dibawah target sedangkan target tahun berikutnya terus ditingkatkan	Rendahnya capaian tahun 2021 disebabkan adanya perubahan formulasi perhitungan Indeks kualitas lingkungan hidup. Untuk target	Target disesuaikan dengan formulasi penilaian baru: tahun 2022: 72.45, tahun 2023: 72.76, tahun 2024: 73.07, tahun 2025: 73.38 dan pada

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							ditahun 2023 hingga tahun 2026, dinas Perkimtan LH melakukan penyesuaian target yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.	tahun 2026: 73.69.
21.	Indeks Daya Saing Daerah bidang	tanpa satuan	3,15 Tinggi	3.00 Tinggi	95.23	Masih relevan	sudah masuk kategori tinggi	Target 2023 - 2026 tetap tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
	SDM							
22.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	68,42	-	-	Masih relevan	Penilaian tidak dilakukan pemerintah daerah	Target 2023 - 2026 tetap
23.	Jumlah nagari Tangguh bencana	nagari	182 Pratama	34 Pratama	18,68	Capaian jauh dibawah target, namun penetapan target tahun-tahun berikutnya masih tinggi	Indikator Nagari Pratama adalah Nagari yang memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang dibentuk tahun 2016-2017. Namun tahun 2021, KSB tersebut sudah tidak aktif. Tahun 2022, tinggal 45 Nagari yang berstatus nagari tangguh bencana (pratama).	Penyesuaian target: tahun 2023: 67 nagari Pratama; tahun 2024: 87 nagari Pratama; tahun 2025: 107 nagari pratama; dan tahun 2026: 127 nagari pratama.
			0 Madya	0 Madya				
			0 Utama	0 Utama				

Hasil review terhadap indikator kinerja OPD juga dianalisis berdasarkan hasil capaian dan target yang ditetapkan RPJMD 2021-2026 sebagaimana disajikan Tabel 5.

**Tabel 5. Analisis Indikator Kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD)**

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
1.	a. Angka kematian bayi b. Angka kematian ibu c. Prevalensi stunting d. Angka kesakitan e. Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	<p>Indikator untuk kinerja OPD yang terkait sektor kesehatan terlihat agak sulit untuk dijelaskan datanya, baik untuk penetapan target maupun realisasi. Dalam beberapa pertemuan FGD juga belum ditemukan keyakinan terhadap data karena cara pengukuran yang kurang dipahami stakeholders.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengapa target angka kematian bayi selalu ditetapkan 8, sementara capaiannya tahun 2021 diatas 100%.</li> <li>- Mengapa angka kematian ibu meningkat sangat tajam, mencapai 172 tahun 2021, sementara tahun sebelumnya adalah 100. Apa kejadian yang menyebabkannya begitu tinggi angka kematian ibu dalam 1 tahun tersebut.</li> <li>- Berapa sesungguhnya data stunting sehingga targetnya tidak dibuat optimis?</li> <li>- Angka kesakitan mengapa</li> </ul>	<p>perlu pendataan yang lebih akurat, data yang lebih terbuka dengan susunan kriteria yang jelas untuk pengukuran indikator kinerja dimulai dari pelaksana satuan kerja tingkat desa / nagari, sehingga datanya valid</p>

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		<p>tidak mencapai kinerja yang baik melebihi target?</p> <p>- Apa masalahnya sehingga kinerja persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatannya hanya 86,27%?</p>	
2.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	<p>IKU ini apabila ditargetkan selalu meningkat dikhawatirkan akan dapat menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Tetapi dari sisi lain, jumlah PPKS yang menerima selalu meningkat juga dapat diartikan bahwa bantuan itu memang mencapai sasarannya, yakni mendekati semua PPKS.</p> <p>Bantuan untuk PPKS di Pesisir Selatan 90% ternyata berasal dari pusat. Hasil capaian di tahun 2021 sebesar 65,28 - lebih tinggi dari target, disebabkan banyaknya kejadian bencana alam dan pandemik Covid-19, sehingga menyebabkan banyaknya bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Target capaian untuk</p>	Perlu kecermatan penilai dan menggunakan pola pemberdayaan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		tahun 2022 tidak dilakukan rasionalisasi.	
3.	Pencapaian skor pola pangan harapan	Nilai Pencapaian skor pola pangan harapan pada tahun 2019 dinilai baik sebesar 86,4. Namun akibat dari pandemi covid 19 angka tersebut turun secara signifikan di tahun 2020 menjadi 81,7. Hal ini akibat dari dampak Covid 19 menyebabkan jumlah asupan kalori makanan masyarakat dibawah standar normal. Juga dipengaruhi rendahnya daya beli masyarakat, naiknya harga pangan, akses pangan yang terbatas, banyaknya pengangguran, dan terjadi pengurangan pendapatan.	dilakukan rasionalisasi IKU RPJM pada indikator pencapaian skor pola pangan harapan; tahun 2023 menjadi 82, tahun 2024 menjadi 84, tahun 2025 menjadi 85 dan pada tahun 2026 menjadi 87.
4.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	IKU ini mengalami dualism bentuk pengukuran, sehingga sulit menetapkan penilaian terhadap kinerja yang sedang direview. Menurut Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan OSS, jenis investasi yang dilaporkan adalah semua besaran investasi, dengan nilai $\geq 5$ milyar rupiah dan dibawah 5 milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan. Sementara, Kementerian investasi juga melakukan pendataan terhadap besaran investasi di	Perlu penyesuaian target sesuai usulan OPD terkait: a.

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		daerah, namun nilai investasi yang direkap hanya dengan nilai $\geq 5$ milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan. Target nilai investasi swasta dan masyarakat versi LKPM/OSS: 2022 sebesar 1,95 T, 2023 sebesar 2,1 T, 2024 sebesar 2,3 T, 2025 sebesar 2,5 T, tahun 2026 sebesar 2,75 T. b. Target nilai investasi swasta dan masyarakat versi Kementerian Investasi: tahun 2022 sebesar 556 M, tahun 2023 sebesar 584 M, Tahun 2024 sebesar 613 M, tahun 2025 sebesar 644 M, dan tahun 2026 sebesar 676 M.	
5.	a. Nilai PDRB pertanian (ADHK) b. Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	IKU ini sebenarnya penting untuk melihat sektor yang dominan yang dapat menjadi basis perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun karena capaian tahun 2021 dinilai sangat baik, diatas 100%, seharusnya target tentu bisa dibuat lebih optimistic.	Perlu penyesuaian target tahun 2023-2026 agar lebih rasional dan optimistik sesuai dengan hasil capaian pada tahun sebelumnya.  Selain itu, kinerja ekonomi sektor lainnya juga dapat diukur sebagai IKU OPD terkait agar komposisi perekonomian daerah kabupaten

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
			dapat diukur secara lebih baik dan terbuka.
6.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	<p>Pada IKU ini terdapat kesalahan pendataan tahun 2021, tertulis target 29,55 seharusnya 41,73.</p> <p>IKU ini melihatkan hasil kinerja yang baik, ternyata adalah karena besarnya alokasi pendanaan untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang berasal dari Kementrian PU dan Tata Ruang, pokok-pokok pikiran anggota DPRD, dana PHJD (Program Hibah Jalan Daerah), dan dari DAU. Sampai dengan tahun 2023 kegiatan peningkatan jalan kabupaten masih menjadi prioritas PUPR. Pada tahun 2023 pemerintah pusat melalui DAU juga akan mengalokasikan dana cukup besar untuk kegiatan PU dan Tata Ruang yang diperkirakan mengungkit angka Persentase jalan kabupaten kondisi baik. Dengan kondisi tersebut maka PUTR melakukan rasionalisasi IKU RPJM pada indikator persentase jalan kabupaten kondisi baik menjadi sebagai berikut; tahun 2022</p>	<p>Dilakukan penyesuaian target sesuai alokasi dana yang juga makin besar dari luar pemerintah Kab Pessel</p>



No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		menjadi 44.22, tahun 2023 menjadi 45, tahun 2024 menjadi 46, tahun 2025 menjadi 47 dan pada tahun 2026 menjadi 48.	
7.	a. Proporsi lahan sawah beririgasi baik b. Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Tidak banyak informasi yang dapat diberikan untuk memperjelas ukuran kinerja dan menilai hasil kinerja.	Perlu data yang lebih akurat untuk menetapkan target yang lebih real di masa yang akan datang
8.	a. Jumlah kunjungan wisatawan b. Lama tinggal wisatawan	IKU ini sulit untuk diukur kinerjanya karena datanya belum berasal dari data yang sesungguhnya berpotensi untuk diukur dengan metoda pengukuran yang lebih objektif dan efektif.	Perlu perbaikan formula untuk menghitung jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan sehingga diperoleh angka yang objektif dengan metoda yang lebih efektif
9.	a. Persentase pemenuhan standar pendidikan 8 b. Harapan Lama Sekolah c. Rata-Rata Lama Sekolah	Pasca diterbitkannya PP 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan, terjadi perubahan indikator persentase pemenuhan 8 standar pendidikan menjadi 3 indikator standar nasional pendidikan, yakni Indeks Literasi, Indeks Numerasi, dan Indeks Karakter. Oleh karena itu indikator	IKU ini perlu penyesuaian pengukuran standard dan capaian dengan berubahnya 8 kriteria sebagai standar pendidikan menjadi 3 kriteria penilaian

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		<p>kinerja utama pendidikan di RPJMD, diubah dengan memuat ke tiga indikator tersebut. Adapun penyesuaian target untuk masing masing indikator tersebut adalah sebagai berikut; indeks Literasi untuk tahun 2023 adalah 1.80, tahun 2024 adalah 1.90, tahun 2025 adalah 2.00, dan pada tahun 2026 adalah 2.10. Untuk Indeks Numerasi untuk tahun 2023 adalah 1.70, tahun 2024 adalah 1.80, tahun 2025 adalah 1.90, dan pada tahun 2026 adalah 2.00. Sedangkan untuk Indeks Karakter untuk tahun 2023 adalah 2.12, tahun 2024 adalah 2.13, tahun 2025 adalah 2.14, dan pada tahun 2026 adalah 2.15. Saat ini posisi Rapor Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat provinsi berada 2 terbawah sesudah Kabupaten Kepulauan Mentawai</p>	
10.	<p>a. Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi</p> <p>b. Jumlah pemuda berprestasi tingkat</p>	<p>IKU ini tidak dapat menggunakan ukuran satu nilai karena pendidik dan siswa merupakan sumberdaya yang berbeda. Kompetensi dan kebutuhan peningkatan kompetensi untuk berprestasi tentu juga berbeda. Begitu juga</p>	<p>Buat indikator yang terpisah untuk mengukur kinerja pendidik, siswa dan pemuda yang berprestasi. Buat indikator prestasi yang diharapkan untuk</p>

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
	provinsi dan nasional	pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional, membutuhkan data yang berbeda dasar pengukurannya.	ketiganya secara objektif sehingga program yang akan dibuat untuk peningkatan kinerja juga lebih jelas dan lebih baik.
11	a. Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta  b. Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	Kedua IKU ini sulit untuk diukur secara objektif karena menyangkut kepada tingkat keimanan dan kesolehan masyarakat. Pembayaran zakat juga memerlukan kriteria yang spesiif dengan hitungan yang tidak dapat diberlakukan sama kepada semua orang yang bekerja. ASN yang diwajibkan berzakat melalui pemotongan gaji, belum tentu semuanya adalah orang yang wajib membayar zakat. Begitu pula ketika seseorang pergi ke masjid untuk shalat subuh, perlu ditetapkan apa kriteria partisipasinya untuk berjamaah sudah tergolong kriteria yang objektif untuk dihitung.	IKU ini sangat sensitive untuk dijadikan IKU OPD yang secara teknis harus diukur. Disarankan mengganti dengan indikator yang mengukur dampak kesolehan sesorang karena agamanya, misal: keamanan dan kenyamanan penduduk tinggal di daerah.
12	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	IKU ini mempercayakan datanya kepada laporan masyarakat. Sementara hal ini sangat sensitive untuk diungkap.	Perlu kiat dan teknik pendataan yang lebih baik dan terbuka kepada publik

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU ini diukur oleh BPS, dengan kriteria pengukuran yang belum dipahami oleh OPD dan masyarakat	Perlu dibuat sistem pendataan yang terbuka dan terus menerus terpantau bagaimana kesetaraan gender sesungguhnya dipraktekkan dalam kehidupan dan kegiatan pembangunan sehari-hari

Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review sebagai Indikator Kinerja OPD, disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review sebagai Indikator Kinerja OPD**

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	7,1	112,68	Perlu penjelasan asumsi apa sehingga target tetap dibuat 8, idealnya target menurun	Tidak ada keterangan	Target tahun 2023-2026 dibuat lebih optimis, tidak stagnan
2.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	172	58,14	perlu dikaji mengapa terjadi peningkatan angka kematian, adakah kasus ekstrim terjadi	Tidak ada keterangan	Perlu penyesuaian target 2023 - 2026 tetap

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
						tahun 2021?		
3.	Prevalensi stunting	persen	11,6	11,8	98,31	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target	Tidak ada keterangan	Target 2023 - 2026 tetap
4.	Angka Kesakitan	persen	16,28	16,57	98,25	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target	Tidak ada keterangan	Target 2023 - 2026 tetap
5.	Persentase masyarakat yang	persen	75	64,7	86,27	Kinerja kurang baik,	Tidak ada keterangan	Target 2023 - 2026 tetap

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
	terlindungi hak layanan kesehatan					perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target		
6.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52,54	65,28	124,25	Capaian tahun 2021 jauh melebihi target	Bantuan untuk PPKS ini 90% berasal dari pemerintah Pusat. Capaian tahun 2021 >100% karena banyak penyaluran bantuan bencana alam dan pandemik Covid-19 dari Pusat, bukan	Target 2023 - 2026 tetap

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							Pemda	
7.	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86,5	81,7	94,45	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target	Skor PPH turun tahun 2020 sebagai dampak Covid 19 sehingga asupan kalori makanan masyarakat turun di bawah standar normal, daya beli menurun dengan naiknya harga <sup>2</sup> , dan akses pangan menjadi terbatas. Dengan kondisi yang sudah normal, target selanjutnya	Target 2023 - 2026 tetap



No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							a diharapkan dapat dicapai.	
8.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rupiah	200.000	1.767.753.325	Tidak dapat dihitung	Penetapan target yang optimistik	Ukuran nilai investasi ada dua versi, yakni versi LKPM / OSS berdasarkan nilai investasi $\geq 5$ milyar rupiah dan $< 5$ milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan. Versi kedua nilai investasi dari Kementrian hanya menghitung investasi	Penyesuaian target 2023-2026: Versi LKPM/OSS; tahun 2023: 2,1 T, tahun 2024: 2,3 T, tahun 2025: 2,5 T; tahun 2026: 2,75 T. Versi Kementerian Investasi: tahun 2023: 584 M, tahun 2024: 613 M, tahun 2025: 644 M; tahun 2026: 676 M.

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							bernilai ≥ 5 milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan.	
9.	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Triliun Rupiah	3,55	5, 56	156,50	kinerja yang baik, capaian jauh melebihi target 2021.	Tidak ada keterangan	Perlu penyesuaian target 2023-2026
10.	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rupiah	703,61	1.015,11	144,27	kinerja yang baik, capaian jauh melebihi target 2021.	Tidak ada keterangan	Perlu penyesuaian target 2023-2026
11.	Rasio Konektivitas	persen	55	55	100,00	Masih relevan	Dinas Perhubungan masih melakukan pendataan	Target 2023-2026 tetap

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							ulang dilapangan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022.	
12.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29,55	29,55	100,00	Masih relevan	Data capaian di tahun 2021 direvisi dari 29,55 menjadi 41,73. Besarnya alokasi dana untuk PUPR ternyata mengungkit angka persentase jalan kabupaten kondisi baik secara signifikan .	Pernyesuain target menjadi: tahun 2023: 45; tahun 2024: 46; tahun 2025: 47; tahun 2026: 48.

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
13.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59,05	59,13	100,14	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
14.	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	4700	4800	102,12	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
15.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.000.000	344.197	34,42	Perlu kajian mengapa realisasi rendah sekali dari target	Data capaian hanya berasal dari objek wisata yang berbayar (Carocok, Pulau Setan, Jembatan Akar, Sumedang, Sako, dll (ada 63 Objek wisata)).	Perlu penyesuaian target: Tahun 2023: 1.320.000; Tahun 2024: 1.500.000, tahun 2025: 1.650.000; tahun 2026: 1.700.000.

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							Penghitungan kedepan akan ditambah dengan pendataan dari objek wisata tidak berbayar (POKDARWIS).	
16.	Lama tinggal wisatawan	hari	1,25	1,25	100,00	Bagaimana menghitung lama tinggal, angka tidak realistis 1,25 hari	Perlu perbaikan formulasi untuk menghitung indikator lama tinggal wisatawan sehingga diperoleh angka yang objektif.	Perlu penyesuaian target 2023-2026 dengan rumus yang lebih realistis
17.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rupiah	12	7,2	60,00	Kinerja kurang baik, perlu strateg	7 dari 18 total jenis ekonomi kreatif,	Penyesuaian target: tahun 2023: 20 M;

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
						i yang lebih efektif untuk mencapai target.	ada di Kab. Pesisir Selatan. Target terla optimistik.	tahun 2024: 25 M, tahun 2025: 30 M, tahun 2026: 35 M.
18.	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen	10,56	12,72	120,45	masih relevan	Terjadi perubahan indikator persentase pemenuhan 8 standar pendidikan menjadi 3. Sehingga rapor Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat provinsi berada 2 terbawah sesudah Kabupaten Kepulauan	Perubahan IKU - menjadi tiga IKU baru: Indeks Literasi: tahun 2023:1.80, tahun 2024:1.90, tahun 2025:2.00; tahun 2026:2.10. Indeks Numerasi: tahun 2023:1.70, tahun 2024:1.80,

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							Mentawai	tahun 2025:1.90; tahun 2026:2.00. Indeks Karakter: tahun 2023:2.12, tahun 2024:2.13, tahun 2025:2.14; tahun 2026:2.15.
19.	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,36	13,33	99,78	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
20.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,29	8,27	99,76	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
21.	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat	orang	4	3	75,00	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif	Tidak ada keterangan	Perlu penyesuaian target 2023-2026, untuk setiap kategori pendidik

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
	provinsi					f untuk mencapai target.		dan siswa
22.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	5,9258	5,9258	100	perlu kajian untuk pengukuran yang lebih realistis.	Target belum realistis karena pesimis dalam implementasi (anggaran sangat kecil).	Target 2023-2026 tetap
23.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,4	63	65,35	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target.	Tidak ada keterangan	Tidak efektif dan tidak objektif untuk ditargetkan



No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
24.	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	<10 Rendah	>30 Tinggi	300	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Tidak perlu sebagai indikator kinerja
25.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10	100	Target pesimis tik	Tidak jelas berapa target target untuk Nasional dan berapa provinsi. Nilai indikator juga stagnan, Peningkatan target ini didasarkan kepada banyaknya even olah raga ditahun tahun kedepan seperti Pekan	Perlu penyesuaian target 2023-2026, untuk setiap kategori nasional dan provinsi

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							Olahraga Provinsi (PORPROV) .	
26.	Jumlah wirausahawan yang berdayasaing	orang	-	-		Kinerja tidak bisa dinilai	Tidak ada keterangan	Tidak dapat ditentukan
27.	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00085	0,00053	160	Agar data representatif, perlu penjelasan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
28.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	90,5208	90,533	100	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
29.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	56,93	100	Mengapa target dibuat tetap	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap

#### 4.4. Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021-2026

**Tabel 7. Rasionalisasi Target kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
1.	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,03	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68
2.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,37	4,72	4,65	4,68	4,70	4,72
3.	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	56 (CC)	58 (CC)	60 (B)	62 (B)	64 (B)	65 (B)
4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	66,67 (B)	70,00 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	78 (BB)
6.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3215	3223	3229	3234	3240
7.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)
8.	Indeks Kelembag	tanpa satuan	P-3 Cukup	P-3 (Cukuf	P-4 (Efekt	P-4 (Efekt	P-5 (Sanga	P-5 (Sanga

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
	aan		efektif)	Efektif)	if)	if)	t Efektif)	t Efektif)
9.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,34	3,40	3,55	3,75	3,95	34,00
10.	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	48,78	62	71	77	81	85
11.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	97 (informatif)	97 (informatif)	97 (informatif)	98 (informatif)	98 (informatif)	98 (informatif)
12.	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	49,34	60,02	62,32	62,52	62,72	62,82
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	83,65	82.00	84.00	85.00	85.00	85.00
14.	Usia Harapan Hidup	tahun	70,96	71,22	71,39	71,57	71,74	71,9
15.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	7,1	12	12	11	11	10
16.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	172	95	90	85	80	75
17.	Prevalensi stunting	persen	11,8	11,4 (10,92)	11,2 (10,26)	11 (9,65)	10,9 (9,20)	10,8 (8,88)
18.	Angka Kesakita	persen	16,57	15,95	15,67	15,39	15,12	14,84

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
	n							
19.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	64,7	80	85	90	95	100
20.	Tingkat Kemiskinan	persen	7,92	7,2	6,9	6,65	6,45	6,25
21.	Indeks Gini	tanpa satuan	0,253	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
22.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	65,28	53	53,56	54,2	55,04	56,05
23.	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	81,7	87	87,5	88	88,58	89
24.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/ thn	9.270.000	9.325.000	9.369.000	9.534.000	9.734.000	9.949.000
25.	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	9,79	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923
26.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Versi LKPM/OSS Trilyun Rupiah	1.767.753.325	1,95 T	2,1 T	2,3 T	2,5 T	2,75 T

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
27.	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Triliun Rupiah	3.603	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
28.	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rupiah	725,00	735	746	758	771	787
29.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,97	6,85	6,4	5,8	5,2	4,95
30.	Rasio Konektivitas	persen	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59
31.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29,55	31,9	32,9	33,9	34,9	35,9
32.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59,13	59,2	60,75	62,6	64,6	66,7
33.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Tanpa satuan	75,8	72,45	72,76	73,07	73,38	73,69
34.	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	4800	5200	5700	6200	6700	7200
35.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	344.197	1.200.000	1.320.000	1.500.000	1.650.000	1.700.000

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
	n							
36.	Lama tinggal wisatawan	hari	1,25	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5
37.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rupiah	7,2	18	20	25	30	35
38.	Persentase pemenuhan standar pendidikan	Indeks literasi	12,72		1,80	1,90	2,00	2,10
		Indeks numerik			1,70	1,80	1,90	2,00
		Indeks karakter			2,12	2,13	2,14	2,15
39.	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,33	13,4	13,45	13,49	13,53	13,57
40.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,27	8,32	8,35	8,38	8,4	8,43
41.	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	Pendidik (orang)	3.00	2	3	4	5	6
		Siswa (Orang)		2	4	5	7	8
42.	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,000)	Tinggi (3,200)	Tinggi (3,350)	Tinggi (3,500)	Tinggi (3,650)	Sangat Tinggi (3,800)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
43.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	5, 9258	6,643	7,277	7,9741	8,7985	10,0682
44.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	63	96,5	96,6	96,7	96,8	100
45.	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	Tinggi (>30orang)	Rendah (≤10 orang)	Sedang (11 s.d 20 orang)	Sedang (11 s.d 20 orang)	Tinggi (≥21 orang)	Tinggi (≥21 orang)
46.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Nasional (orang)	10	5	7	9	11	13
		Provinsi (orang)		12	15	16	18	20
47.	Jumlah wirausahawan yang berdayasaing	orang	-	500	700	900	1100	1300
48.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan		69,92	71,42	72,92	74,42	75,92
49.	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan	persen	0,00053	0.0008	0.00075	0.0007	0.00065	0.0006



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
	n terhadap jumlah keluarga							
50.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	905330	91,0944	91,7109	92,4139	93,2033	94,0788
51.	Jumlah nagari Tangguh bencana	nagari	Pratama (34)	Pratama (45)	Pratama (67)	Pratama (87)	Pratama (107)	Pratama (127)
			Madya (0)	Madya (0)	Madya (20)	Madya (40)	Madya (60)	Madya (80)
			Utama (0)	Utama (0)	Utama (0)	Utama (20)	Utama (40)	Utama (60)
52.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93

**Keterangan:**

na: harap diisi dengan rasionalisasi target sesuai analisis yang diberikan

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi yang disampaikan di atas dalam rangka rasionalisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021 -2026, diharapkan hasil rasionalisasi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pembangunan tahunan untuk periode 2023-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sangat diperlukan dukungan data dan informasi terkini yang lebih dipercaya dengan sumber data yang valid untuk dapat menjadikan target dan realisasi mencapai kinerja yang baik sesuai yang diharapkan.

Indikator kinerja OPD adalah indikator yang sangat menentukan Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, maka perlu memilih indikator pembangunan yang terdefinisikan dalam pengertian yang jelas, persepsi yang sama, dan dipahami dengan baik. Data tersedia dengan mudah dengan metoda pengumpulan data yang terjangkau, data yang valid dan representatif untuk keseluruhan hasil yang diharapkan. Dengan demikian indikator akan terlihat dan dapat diamati dengan baik. Indikator yang sulit diamati tetapi penting, dapat diganti dengan indikator proksi.

Kebutuhan informasi kinerja akan menggambarkan akuntabilitas sesuai kewenangan, tugas dan fungsi serta peran setiap perangkat daerah dalam mendukung dan mewujudkan visi pembangunan daerah. RPJMD periode 2021 - 2026 ini sekaligus merupakan RPJMD periode terakhir dalam periode RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, RPJMD ini akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang yang dicita - citakan 20 tahun yang lalu.

Diharapkan dengan selesainya dokumen ini, indikator target 2023-2026 menjadi lebih rasional dan lebih menjamin tercapainya tujuan pembangunan kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih baik. Rasionalisasi target - target tersebut disusun berdasarkan hasil pemeriksaan kepada OPD terkait dan didiskusikan secara series untuk disepakati. Hal - hal yang belum terakomodasi dalam laporan ini tentu memberi kesempatan untuk kembali membuka diskusi dan melanjutkan analisis, karena

perencanaan memang tidak seharusnya berhenti ketika dokumennya selesai. Semoga bermanfaat untuk kebaikan bersama.

## LAMPIRAN

### Catatan FGD RASIONALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD dari beberapa kali pertemuan

#### 5. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Terdapat perbedaan data capaian target ditahun 2021. Data semula 66.88, sedangkan berdasarkan hasil verifikasi dengan bagian organisasi, capaian target ditahun 2021 adalah 68.72. Penetapan target baru dalam rangka rasionalisasi, perlu peran serta lintas instansi, sebab penilaian AKIB merupakan akumulasi dari 5 komponen penilaian yakni;

- a. Perencanaan kinerja : Bapedalitbang
- b. Pengukuran Kinerja : Bapedalitbang
- c. Pelaporan Kinerja : Bagian Organisasi
- d. Evaluasi Kinerja : Inspektorat
- e. Capaian Kinerja : Tim + OPD

Saran: perlu rapat khusus untuk menetapkan target, dengan menghadirkan OPD-OPD terkait.

#### 6. Skor Nilai LPPD

Skor Nilai LPPD terakhir dinilai pada tahun 2019. Setelah tahun 2019, tidak lagi dilakukan penilaian oleh instansi pusat.

#### 8. Indeks Kelembagaan

Data indeks kelembagaan belum tersedia disebabkan belum adanya formula penilaian dari provinsi. Sampai saat ini provinsi belum melakukan penilaian untuk Indeks Kelembagaan.

#### 9. Indeks SPBE

Terdapat kesalahan penulisan pada target 2021 yang seharusnya 3.12 tertulis 3.2. Skala penilaian Indeks SPBE adalah dari 2.6 sampai dengan >3.5, masuk dalam kategori baik. Nilai maksimal indeks SPBE adalah 5. Pesisir Selatan berada dalam **kategori baik**. Pada penilaian tahun 2021, Pesisir Selatan berada pada peringkat 1 se-Sumatera Barat, dan peringkat 6 se-Indonesia.

Dalam rangka merasionalisasikan IKU RPJMD 2021- 2026, Dinas KOMINFO optimis menaikkan nilai target Indeks SPBE pada tahun 2022 menjadi 3.40, tahun 2023 menjadi 3.55, tahun 2024 menjadi 3.75, tahun 2025 menjadi 3.95 dan pada tahun 2026 menjadi 4.00. Hal tersebut didasarkan kepada telah tersedianya **arsitektur SPBE** pada tahun 2023.

Sebab tersedianya arsitektur SPBE memberikan kontribusi nilai yang besar, terhadap peningkatan nilai secara keseluruhan.

Cakupan layanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan telah terselenggaranya aplikasi SIPD, E- SAKIP, dan telah terinteroperabilitasnya aplikasi SINAR PESEL dengan aplikasi SIMDUK Dinas DUKCAPIL. Aplikasi SINAR dan PPID milik Pesisir Selatan saat ini juga telah direplikasi oleh beberapa kabupaten di Sumatera Barat.

## **10. Indeks Profesionalitas ASN**

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Kontribusi masing-masing indikator terhadap hasil penilaian secara keseluruhan:

1. Disiplin memberi kontribusi 5%
2. Kualifikasi pendidikan memberi kontribusi 25%
3. Kompetensi memberi kontribusi 40%
4. Kinerja memberi kontribusi 30%

Range penilaian IP ASN 0-100, dibagi dalam kategori; sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (dibawah 60).

Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Pesisir Selatan secara penilaian masih dalam kategori sangat rendah, yakni sebesar 48.78. Secara peringkat di Sumatera Barat nilai Indeks Profesionalitas ASN yang terbaik adalah 76.58 oleh Kota Padang Panjang.

Namun angka 48.78 di Kabupaten Pesisir Selatan ini bukanlah angka riil, sebab banyak kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang dilakukan oleh OPD, tidak dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap seperti tidak adanya sertifikat peserta.

Berdasarkan hal-hal diatas maka BKPSDM melakukan penurunan target capaian untuk tahun 2023 menjadi 58, tahun 2024 menjadi 59, tahun 2025 menjadi 60 dan pada tahun 2026 menjadi 62.

## **11. Kategori keterbukaan informasi publik**

Range penilaian untuk kategori keterbukaan informasi publik yakni di 91-100 berada dikategori informatif. Pada tahun 2021 nilai kategori keterbukaan informasi publik Pesisir Selatan berada di angka 97. Untuk

merasionalisasikan target IKU RPJMD pada tahun 2023 kominfo menurunkan target menjadi 94, tahun 2024 menjadi 95, tahun 2025 menjadi 96, dan pada tahun 2026 menjadi 97. Penurunan target ini didasarkan oleh terjadinya perubahan aplikasi yang digunakan. Sampai dengan tahun 2021, Pesisir Selatan menggunakan aplikasi Satu Data Pesisir Selatan (Sinar Pessel) yang merupakan aplikasi hasil pengembangan sendiri. Pada 2022 kabupaten/kota diharuskan menggunakan aplikasi satu data dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya dikhawatirkan terjadi penurunan nilai capaian secara keseluruhan.

## **12. Indeks Inovasi Daerah**

Perlu dilakukan penyesuaian kembali target indikator dengan mempedomani Juknis yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. Terutama rangka rangka penilaian dan pemberian penghargaan IGA Tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan Juknis yang baru, terjadi perubahan skor range nilai IID menjadi 0 s.d 100. Kategori Tidak dapat Dinilai 0, kurang inovatif 0,01-34,99, Inovatif 35,00 - 60,00, Sangat Inovatif 60,01-100.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dilakukan penurunan target capaian untuk tahun 2022 menjadi 60.02, tahun 2023 menjadi 62.32, tahun 2024 menjadi 62.52, tahun 2025 menjadi 62.72 dan pada tahun 2026 menjadi 62.82.

## **13. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik**

Tingkat keakuratan data capaian di tahun 2021 masih diragukan, sebab pengambilan data sampel hanya dilakukan pada 3 OPD (Rumah Sakit M. Zein, BKPSDM, dan Dinas DUKCAPIL) yang melakukan pelayanan publik. Seharusnya untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, sampel diambil dari semua OPD yang melakukan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **15. Angka Kematian Bayi**

### **16. Angka Kematian Ibu**

### **17. Prevalensi stunting**

### **18. Angka Kesakitan**

### **19. Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan**

### **20. Tingkat Kemiskinan (BPS)**

### **21. Indeks Gini**

### **22. Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

Bantuan untuk PPKS di Pesisir Selatan 90% berasal dari pusat. Hasil capaian di tahun 2021 sebesar 65,28 - lebih tinggi dari target, disebabkan banyaknya kejadian bencana alam dan pandemik Covid-19, sehingga menyebabkan banyaknya bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Target capaian untuk tahun 2022 tidak dilakukan rasionalisasi.

### **23. Pencapaian skor pola pangan harapan**

Nilai Pencapaian skor pola pangan harapan pada tahun 2019 telah cukup baik dengan nilai 86,4. Namun akibat dari pandemi covid 19 angka tersebut turun secara signifikan di tahun 2020 menjadi 81,7. Hal ini akibat dari dampak Covid 19 menyebabkan jumlah asupan kalori makanan masyarakat dibawah standar normal. Juga dipengaruhi rendahnya daya beli masyarakat, naiknya harga pangan, akses pangan yang terbatas, banyaknya pengangguran, dan terjadi pengurangan pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan rasionalisasi IKU RPJM pada indikator pencapaian skor pola pangan harapan; tahun 2023 menjadi 82, tahun 2024 menjadi 84, tahun 2025 menjadi 85 dan pada tahun 2026 menjadi 87.

### **26. Nilai investasi swasta dan masyarakat**

Capaian investasi swasta dan masyarakat di tahun 2021 sangat besar dibandingkan dengan target, karena merupakan akumulasi dari jumlah investasi di tahun sebelumnya pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan OSS. Jenis investasi yang dilaporkan adalah semua besaran investasi, dengan nilai  $\geq 5$  milyar rupiah dan dibawah 5 milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan.

Di sisi lain, Kementerian investasi juga melakukan pendataan terhadap besaran investasi di daerah, namun nilai investasi yang direkap hanya dengan nilai  $\geq 5$  milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan.

Jadi dalam rangka rasionalisasi indikator IKU Nilai investasi swasta dan masyarakat, DPMPSTP menyediakan dua macam data; versi LKPM/OSS dan versi Kementerian Investasi, sebagai berikut:

- a. Target nilai investasi swasta dan masyarakat versi LKPM/OSS: 2022 sebesar 1,95 T, 2023 sebesar 2,1 T, 2024 sebesar 2,3 T, 2025 sebesar 2,5 T, dan tahun 2026 sebesar 2,75 T.
- b. Target nilai investasi swasta dan masyarakat versi Kementerian Investasi: tahun 2022 sebesar 556 M, tahun 2023 sebesar 584 M, Tahun 2024 sebesar 613 M, tahun 2025 sebesar 644 M, dan tahun 2026 sebesar 676 M.

### 30. Rasio Konektivitas

Setelah melakukan pengambilan data ulang maka dilakukan perubahan nilai perhitungan dan perubahan target menjadi sebagai berikut; tahun 2022 menjadi 0.51, tahun 2023 menjadi 0.53, tahun 2024 menjadi 0.55, tahun 2025 menjadi 0.57 dan pada tahun 2026 menjadi 0.59.

### 31. Persentase jalan kabupaten kondisi baik

Berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas PUTR terdapat perbaikan data hasil capaian di tahun 2021 dari target 29,55 menjadi 41,73. Meningkatnya hasil target capaian ini disebabkan oleh besarnya alokasi pendanaan untuk kegiatan pemeliharaan jalan. Alokasi dana tersebut berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD, dana PHJD (Program Hibah Jalan Daerah), dan dari DAU. Sampai dengan tahun 2023 kegiatan peningkatan jalan kabupaten masih menjadi prioritas PUTR. Pada tahun 2023 pemerintah pusat melalui DAU mengalokasikan dana cukup besar untuk kegiatan PUTR. Besarnya alokasi dana untuk PUTR diharapkan bisa mengungkit angka Persentase jalan kabupaten kondisi baik. Dengan kondisi tersebut maka PUTR melakukan rasionalisasi IKU RPJM pada indikator persentase jalan kabupaten kondisi baik menjadi sebagai berikut; tahun 2022 menjadi 44.22, tahun 2023 menjadi 45, tahun 2024 menjadi 46, tahun 2025 menjadi 47 dan pada tahun 2026 menjadi 48.

### 33. Indek kualitas lingkungan hidup

Rendahnya capaian tahun 2021 disebabkan adanya perubahan formulasi perhitungan Indek kualitas lingkungan hidup. Perubahan formulasi ini menyebabkan penurunan angka Indek kualitas lingkungan hidup. Untuk target ditahun 2023 hingga tahun 2026, dinas Perkimtan LH melakukan penyesuain target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Berdasarkan surat edaran ini maka target dinas perkimtan LH menjadi sebagai berikut; tahun 2022 menjadi 72.45, tahun 2023 menjadi 72.76, tahun 2024 menjadi 73.07, tahun 2025 menjadi 73.38 dan pada tahun 2026 menjadi 73.69.

### 35. Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah capaian target di tahun 2021 bukanlah angka sebenarnya, data yang diambil hanya dari beberapa objek wisata yang berbayar. Sehingga untuk perhitungan kedepannya akan ditambahkan dengan pendataan dari objek wisata berbayar. Objek wisata berbayar tersebut meliputi data kunjungan di Carocok, Pulau Setan, Jembatan Akar, Sumedang, Sako, dll (63 Objek wisata), dan tidak berbayar dari POKDARWIS. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan rasionalisasi jumlah kunjungan untuk tahun 2023



menjadi 1.320.000, tahun 2024 menjadi 1.500.000, tahun 2025 menjadi 1.650.000 dan pada tahun 2026 menjadi 1.700.000.

### **37. Jumlah omset usaha ekonomi kreatif**

Dari 18 total jenis ekonomi kreatif terdapat 7 diantaranya berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan rasionalisasi nilai IKU RPJMD jumlah omset usaha ekonomi kreatif untuk tahun 2023 menjadi 20 MILYAR, tahun 2024 menjadi 25 MILYAR, tahun 2025 menjadi 30 MILYAR dan pada tahun 2026 menjadi 35 MILYAR.

### **38. Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan**

Pasca diterbitkannya PP 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan, terjadi perubahan indikator persentase pemenuhan 8 standar pendidikan menjadi 3 indikator standar nasional pendidikan, yakni Indeks Literasi, Indeks Numerasi, dan Indeks Karakter. Oleh karena itu indikator kinerja utama pendidikan di RPJMD, diubah dengan memuat ke tiga indikator tersebut. Adapun penyesuaian target untuk masing masing indikator tersebut adalah sebagai berikut; **indeks Literasi** untuk tahun 2023 adalah 1.80, tahun 2024 adalah 1.90, tahun 2025 adalah 2.00, dan pada tahun 2026 adalah 2.10. Untuk **Indeks Numerasi** untuk tahun 2023 adalah 1.70, tahun 2024 adalah 1.80, tahun 2025 adalah 1.90, dan pada tahun 2026 adalah 2.00. Sedangkan untuk **Indeks Karakter** untuk tahun 2023 adalah 2.12, tahun 2024 adalah 2.13, tahun 2025 adalah 2.14, dan pada tahun 2026 adalah 2.15. Saat ini posisi Rapor Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat provinsi berada 2 terbawah sesudah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### **43. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Angka capaian tahun 2021 yang sama dengan angka target 2021 bukanlah angka sebenarnya dimana capaian telah mencapai target 2021. Untuk pencapaian target tahun selanjutnya dinas Perpustakaan dan Arsip tidak berani memberikan target baru. Hal ini disebabkan dikarenakan kecilnya porsi penganggaran OPD.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Ada 7 variabel yang dinilai untuk menghasilkan nilai IPLM:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat/hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan

## 7. Anggota perpustakaan

Range nilai IPLM:  $\leq 10,92$  kurang,  $10,93-12,99$  cukup,  $13,00-14,72$  baik, dan  $\geq 14,73$  sangat baik.

### 46. Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Nilai indikator stagnan oleh karena itu dilakukan rasionalisasi target capaian nilai IKU Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional untuk tahun 2023 menjadi 14 ORANG, tahun 2024 menjadi 18 ORANG, tahun 2025 menjadi 20 ORANG dan pada tahun 2026 menjadi 26 ORANG. Peningkatan target ini didasarkan kepada banyaknya even olah raga ditahun tahun kedepan seperti Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV).

### 51. Jumlah nagari Tangguh bencana

Pada tahun 2016-2017 telah terbentuk KSB (Kelompok Siaga Bencana) sebanyak 182 nagari pada posisi pratama. Namun sampai dengan tahun 2021, KSB tersebut sudah tidak aktif. Berdasarkan data tahun 2022, tinggal 45 nagari yang berstatus nagari tangguh bencana (pratama). Oleh sebab itu BPBD melakukan rasionalisasi jumlah nagari tangguh bencana untuk tahun 2023 menjadi 67 nagari masuk dalam kategori pratama, tahun 2024 menjadi 87 nagari masuk dalam kategori pratama, tahun 2025 menjadi 107 nagari masuk dalam kategori pratama dan pada tahun 2026 menjadi 127 nagari masuk dalam kategori pratama.